

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan review dan revisi terhadap Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas P3AP2 dan KB akan mencapai tujuannya.

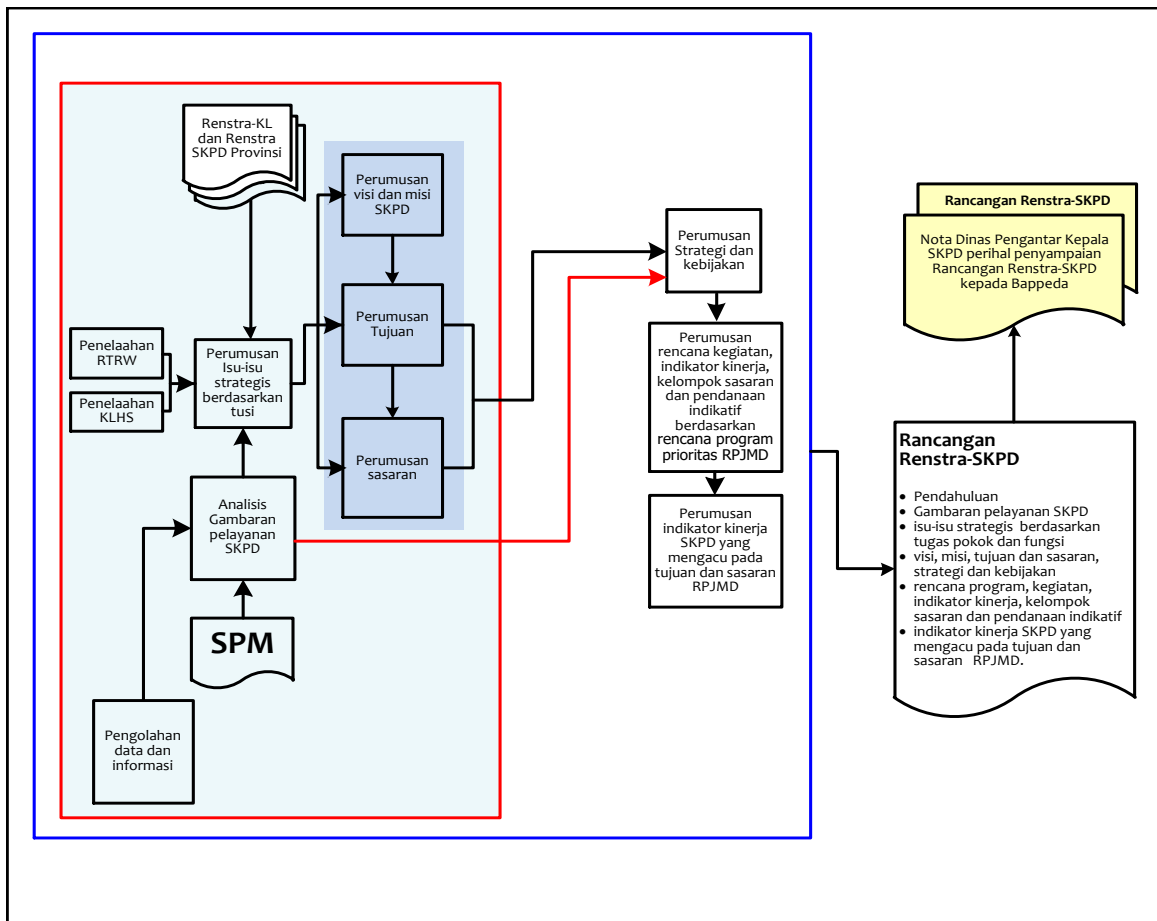
Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada

Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal, maka secara otomatis Renstra Dinas P3AP2 dan KB juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Tegal, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Dinas P3AP2 dan KB juga memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BKKBN.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas P3AP2 dan KB yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2 dan KB. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas P3AP2 dan KB dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional/daerah, mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Dinas P3AP2 dan KB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal menyusun Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota:
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Pelaksanaan Keluarga Berencana;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Review RENSTRA ialah sebagai rumusan strategi, kebijakan, dan program kerja selama 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan misi organisasi. Review Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan serta panduan bahwa program kegiatan yang direncanakan dan disusun sudah mengakomodir upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah seperti yang ditetapkan dalam RPJMD, perkiraan anggaran yang dibutuhkan tentunya dengan memperhatikan celah fiskal daerah dan pagu anggaran jangka menengah yang sudah disepakati bersama melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dokumen Review RENSTRA yang disusun berisi penjabaran program dan kegiatan PD-DP3AP2 dan KB selama 5 tahun (2019-2024). Hal tersebut dimaksudkan agar Review RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas P3AP2 dan KB di Kabupaten Tegal dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan dan penetapan Review RENSTRA juga ditujukan agar seluruh pelaksanaan program kegiatan pada lingkungan organisasi DP3AP2 dan KB dapat terencana, terarah dan terukur, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai visi dan misi organisasi.

Penyusunan Review RENSTRA DP3AP2 dan KB Kabupaten Tegal disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal. Dokumen perencanaan dengan orientasi jangka panjang dapat diidentifikasi sebagai upaya untuk mendesain kondisi yang dicita-citakan di masa mendatang. Kerangka berpikir yang mengacu pada cita-cita masa mendatang diharapkan memberi kejelasan dan mengarahkan pada rumusan masa depan daerah seperti yang sudah di tuangkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal adalah :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menjaga konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan;
- c. Memantapkan perencanaan program dan kegiatan agar terlaksana secara efektif dan efisien, serta memudahkan dalam evaluasi dan pengendalian.

1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3AP2 DAN KB

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan Peluang Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS P3AP2 DAN KB**
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menguraikan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas P3AP2 dan KB dalam lima tahun mendatang
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3A DAN P2KB

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

Penjabaran Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 adalah :

1. Tugas :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Uraian masing-masing tugas dan fungsi :

1). Kepala Dinas :

Tugas Pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2). Sekretaris

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
 - b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
 - c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
 - f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
 - g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3). Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Pengarusutamaan

Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);

- c. Pelaksanaan program operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
- d. Pelaksanaan penerangan dan motivasi operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
- e. Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan operasional Pengarusutamaan Gender (PUG);
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang operasional Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).

4). Kepala Bidang Perlindungan Anak

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program dibidang Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan program Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - c. Pelaksanaan program Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

5). Kepala Bidang Keluarga Berencana

Tugas Pokok : Kepala Dinas dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan program di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keluarga berencana;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja;

6). Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - c. Pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Sejahtera.

7). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

4. Struktur Organisasi

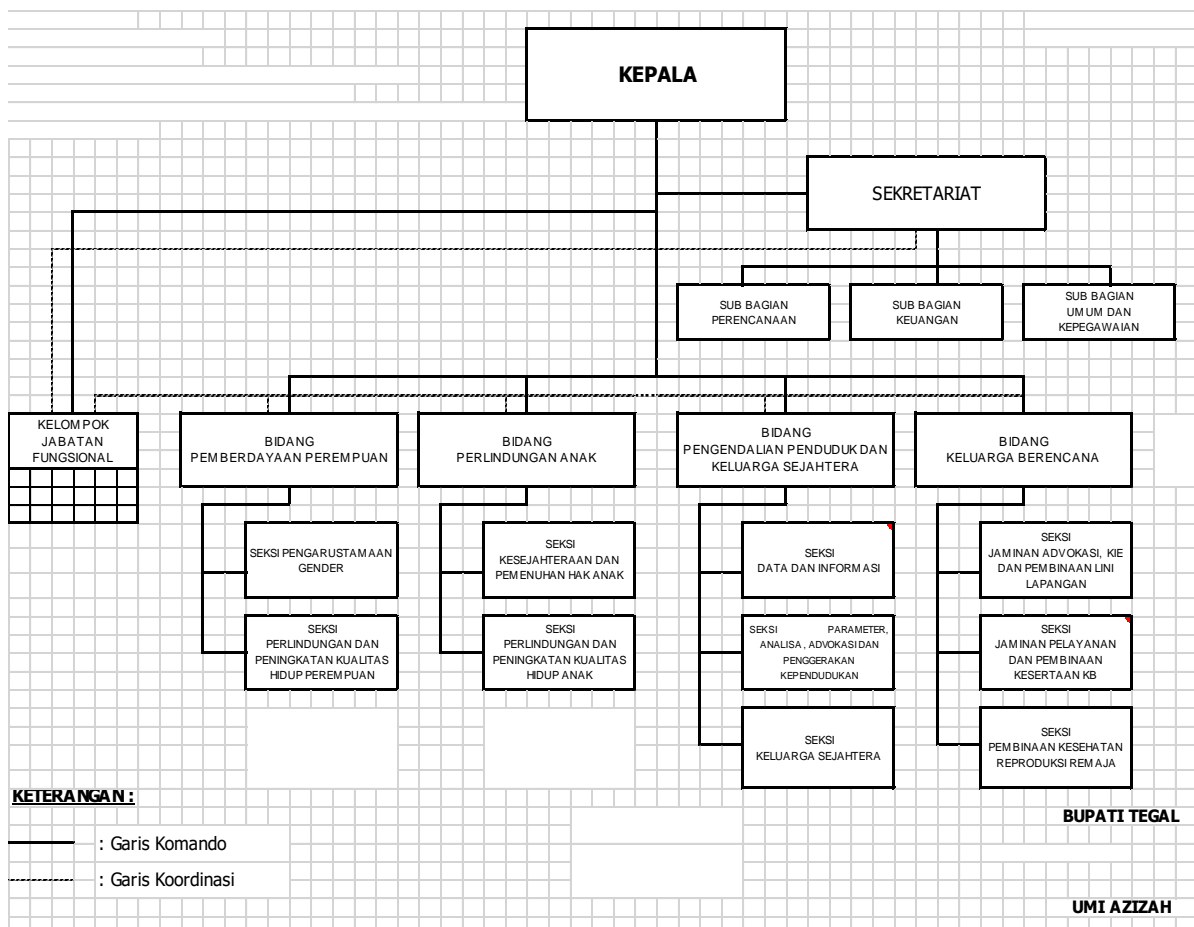
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II)
- b. Sekretaris (Eselon III A), yang membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IV A)
 - Sub Bagian Perencanaan (Eselon IV A)
 - Sub Bagian Keuangan (Eselon IV A)
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan (Eselon III B) yang membawahkan :
 - Seksi Pengarusutamaan Gender (Eselon IV A)
 - Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (Eselon IV A)
- d. Bidang Perlindungan Anak (Eselon III B) yang membawahkan :
 - Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak (Eselon IV A)
 - Seksi Perlindungan & Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Eselon IV A)
- e. Bidang Keluarga Berencana (Eselon III B) yang membawahkan :
 - Seksi Jaminan Advokasi, KIE dan Pembinaan Lini Lapangan (Eselon IV A)
 - Seksi Jaminan Pelayanan & Pembinaan Kesertaan KB (Eselon IV A)
 - Seksi Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (Eselon IV A)

- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera (Eselon III B) yang membawahkan :
- Seksi Data dan Informasi (Eselon IV A)
 - Seksi Parameter, Analisa, Advokasi dan Penggerakan Kependudukan (Eselon IV A)
 - Seksi Keluarga Sejahtera (Eselon IV A)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi dapat dilihat struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal
(Lampiran Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019)



2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber daya manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal sebanyak 151 orang, saat ini jumlah personil Sumber Daya Manusia sebanyak 56 orang yang terdiri atas :

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Unit Organisasi	S2		S1		D3		D1		SMA/Se derajat		SMP/SD		Jumlah Keseluru han	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepala DP3A &P2KB	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat	-	2	2	6	-	1	-	-	4	2	1	-	7	11
Bidang Pemberdayaan Perempuan	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3
Bidang Perlindungan Anak	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Bidang Pengendalian Penduduk	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
Bid. Keluarga Berencana	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2
Bid. Keluarga Sejahtera	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
UPTD P3A & P2KB	4	1	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	13	3
Jml pegawai berdasar jenis kelamin	10	7	12	12	-	1	-	-	7	5	2	-	31	25
Jml pegawai berdasar jenjang pendidikan	17		24		1		-		12		2		56	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kekurangan jumlah pegawai sebanyak 95 orang. Di samping kekurangan pegawai dari segi kuantitas tersebut, juga masih terdapat kekurangan secara kualitas sebanyak $\pm 40\%$ (empat puluh per seratus) yang perlu terus ditingkatkan kemampuannya baik kompetensi maupun kinerjanya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PD.

Ada pun berdasarkan golongan, jumlah pegawai di Dinas P3AP2 dan KB tercantum pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	3	2	5
3	Golongan III	13	18	31
4	Golongan IV	11	5	16

Ketercukupan jumlah pegawai tidak akan memperoleh hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas. Dari awal berdirinya perangkat daerah pada Tahun 2008 sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, namun demikian penyelesaian tugas menjadikan prioritas yang harus dilaksanakan walaupun dengan sarana dan prasarana yang serba minimal. Dengan berjalannya waktu tahun demi tahun terdapat peningkatan anggaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana prasarana yang sangat urgen untuk segera dipenuhi diantaranya personal komputer (PC), laptop/notebook, printer, LCD, kendaraan dinas operasional, meja dan kursi kerja, meja rapat, filling cabinet dan lemari besi. Namun keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana kerja tersebut masih belum mencukupi dan masih ada sarana prasarana yang perlu diperbarui mengingat usia dan perkembangan teknologi.

2.2.2 Aset/modal

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 2.3
Aset Yang Dimiliki

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
I	Bangunan dan Gedung	28
	a. Bangunan Kantor Pemerintah	1
	b. Tempat parkir	1
	c. Pagar keliling	2
	d. Gudang Alat Kontrasepsi	1
	e. Gudang Non Alkon	1
	f. Gedung PPT	1
	g. Mushola	1
	h. Garasi	1
	i. Perpustakaan	1
	j. Balai Penyuluh	17
	k. Rumah Negara Golongan III Type A/Rumdin	1
II	Peralatan dan Mesin	3706
1	Alat-Alat Besar	1
	Portable Generating set	1
2	Alat-Alat Angkut	151
	Mobil	7
	Sepeda Motor	161
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	542
4	Alat Studio dan Komunikasi	56
	Screen Projector	5
	LCD Projector & Attachment	7
	Pesawat Telepon dan Telephone (PABX)	8
	Wireless	5
	Amplifier	1
	Handycam	2
	Camera	2
	Speaker aktif	3
	Facsimili	2
	Public Addres	21
5	Alat-alat kedokteran	2.956
	KIE Kit, BKB Kit, Implant dll	2937
	Timbangan	19
III	Jaringan Listrik	1
	Jumlah Total	3.735

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal. Di samping itu, sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi mengingat hal tersebut merupakan pendukung layanan kepada masyarakat, antara lain peralatan kantor serta klinik korban. Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja OPD yang optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bab ini menjelaskan data dan informasi yang menggambarkan pencapaian - pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019. Data dan informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai persoalan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

2.3.1. Kinerja Pelayanan Umum

Secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian

dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian Kinerja untuk pelayanan manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan Dinas P3A dan P2KB selama tahun 2015 - 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Pelayanan Manajemen Administrasi
Pelayanan Umum, Kepegawaian Keuangan, Dan Perencanaan
Dinas P3A dan P2KB Thn 2015 -2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Dokumen Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB dan Sumber Daya Aparatur	3	3	3	3	3
2	Dokumen Pengelolaan barang Dinas P3AP2&KB dan UPTD	3	3	3	3	3
3	Terpenuhinya administrasi perkantoran dan Proporsi pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terselenggaranya kegiatan penunjang perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
5	Dokumen Pengelolaan administrasi keuangan	1	1	1	1	1
6	Dokumen Perencanaan penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi	4	4	4	4	5

Layanan administrasi Sekretariat meliputi layanan kehumasan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat pengawas instansi pemerintah.

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan pada tahun 2015 – 2019 sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen, sedangkan jumlah dokumen laporan pengelolaan administrasi keuangan sebanyak 5 dokumen. Jumlah dokumen Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB dan Sumber Daya Aparatur serta dokumen Pengelolaan barang Dinas P3A dan P2KB dan UPTD yang dihasilkan pada tahun 2015 – 2019 sebanyak 30 (tiga puluh).

2.3.2. Kinerja Pelayanan Khusus Terkait Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2015-2019. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Thn 2015 -2019

No	Uraian	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Capaian Keadilan & Kesetaraan Gender (APE)	350	350	400	700	0
2	Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri (Jiwa)	5.481	5.804	6.144	6.221	925
3	Jumlah pekerja perempuan di Luar	783	879	516	821	1.243

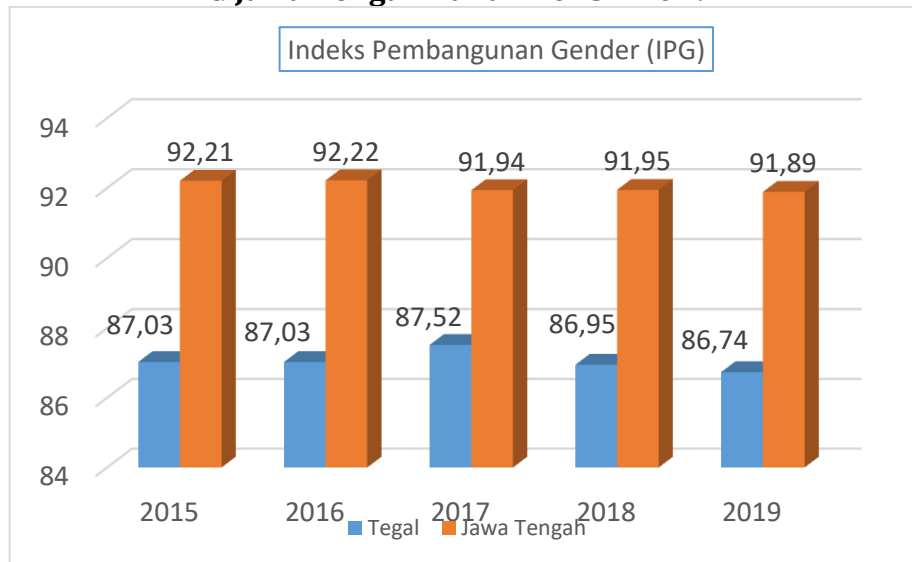
No	Uraian	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	negeri (Jiwa)					
4	Jumlah total pekerja perempuan (Jiwa)	6.264	6.683	6.630	7.042	2.168
5	Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri (%)	87.50	86.85	92.67	88.34	42.72
6	Persentase pekerja perempuan di Luar negeri (%)	12.50	13.15	7.78	11.36	0.573
7	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.721	5.388	5.926	5,341	4.862
8	Jumlah Pekerja Perempuan	10	10	10	10	11
9	Persentase keterwakilan perempuan di legislatif (%)	20	20	20	20	24

Sumber : DP3A danP2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan. IPG Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini.

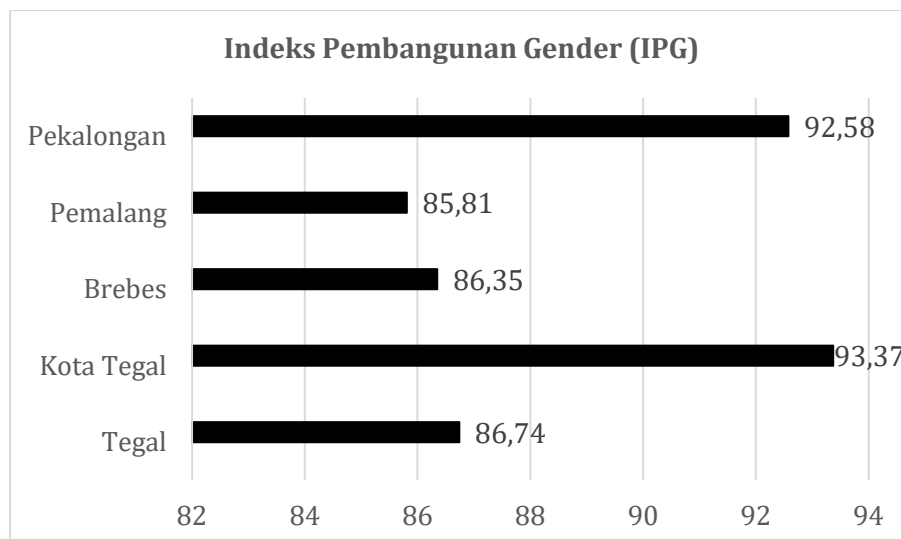
Gambar. 2.1
Grafik Perbandingan Capaian IPG Kabupaten Tegal dengan
IPG Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kabupaten Tegal menunjukkan capaian Kabupaten Tegal lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes, namun lebih masih di bawah Kota Tegal, yang selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

Gambar 2.2.
Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten Tegal dengan
IPG Kabupaten lainnya Tahun 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Apabila dilihat dari komponen pendukung IPG, diketahui bahwa masih tingginya gap antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi yang ditunjukkan pada komponen pengeluaran per kapita tahun 2019 laki-laki sebesar 14,795 sedangkan perempuan sebesar 7,615. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses ekonomi bagi perempuan masih terbatas dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha. Namun demikian pengeluaran perkapita perempuan dari tahun ke tahun pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pergerakan meningkat dikarenakan telah adanya upaya dari pemerintah beserta masyarakat dan dunia usaha dalam memperluas akses perempuan dalam berwirausaha dan bekerja. Pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan tahun 2017 - 2019 sebagai berikut :

Gambar 2.3.

Grafik Persandingan Capaian Pengeluaran per kapita laki-laki dengan perempuan Kab. Tegal Tahun 2017 - 2019

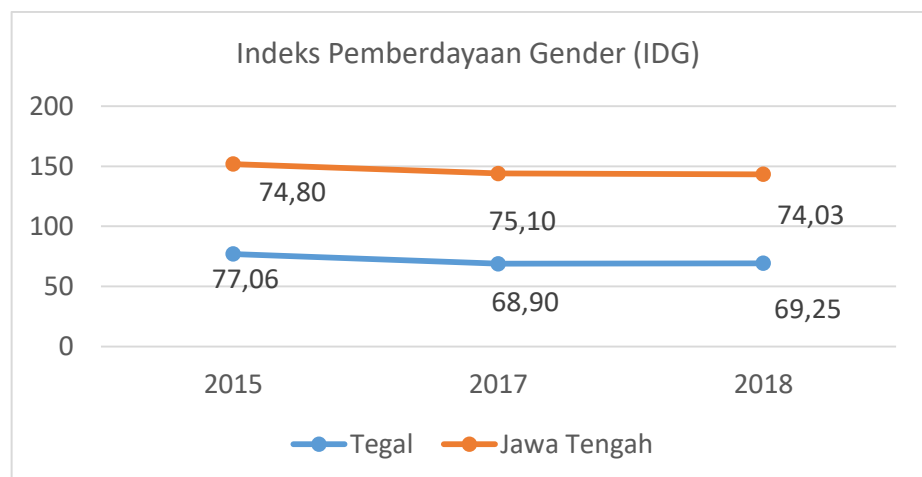


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Selain IPG, indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Tegal tahun 2015 - 2018 menunjukkan tren menurun sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar. 2.4
Grafik Persandingan Capaian IDG Kabupaten Tegal dengan IDG Jawa Tengah Tahun 2015 - 2018

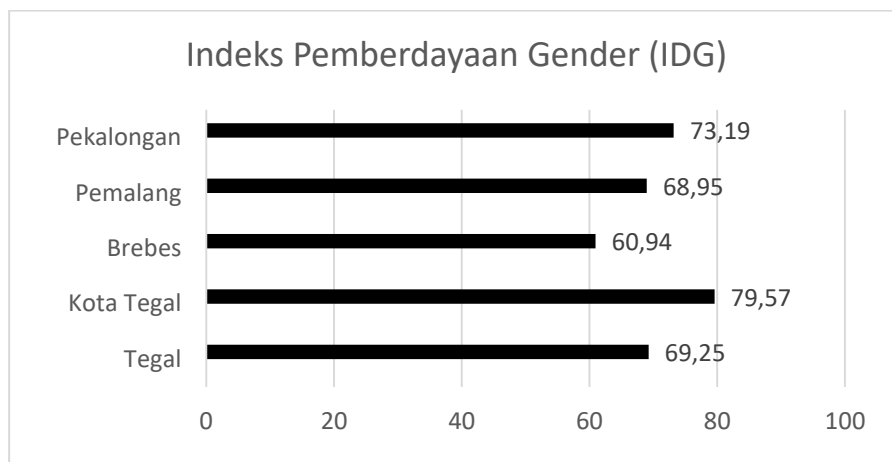


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitar Kabupaten Tegal menunjukkan capaian Kabupaten Tegal lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang,

namun lebih masih di bawah Kota Tegal dan Kabupaten Pekalongan, yang selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut :

Gambar 2.5.
Grafik Persandingan Capaian IDG Kabupaten Tegal dengan IDG Kabupaten lainnya Tahun 2018



Perempuan ASN yang menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 6
Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2015- 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	25.22	26.13	26.75	27.95	28.69

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2019.

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga

Pencapaian Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilihat dari indikator utama yaitu Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Persentase Perempuan Korban Perdagangan Orang dan Persentase Anak Korban Kekerasan.

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Tegal kurun waktu tahun 2015 – 2019 bersifat fluktuatif, hal ini dapat dilihat berdasarkan data berikut ini :

Tabel 2.7
Rasio KDRT di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	51	12	7	6	11
2	Jumlah Rumah Tangga	431.97	430.29	444.49	447.59	450.21
3	Rasio KDRT	0,0012	0,0027	0,0016	0,0013	0.0024

Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Keberadaan Pusat Pelayanan (PPT) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 8
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kab. Tegal 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	61	78	126	53	66
2	Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	100	100	100	100	100

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2019.

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2017 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

3. Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut :

Tabel 2. 9
Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Th 2015-2019

No	Uraian	Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Capaian Pemenuhan Hak Anak	350	350	400	500	500
2	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk	3.48	4.18	5.22	6.62	20.56
3	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1.33	1.33	1.39	1.39	4.9
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	0	2	5	5	5,1
5	Jumlah Tenaga	0	50	100	100	120

No	Uraian	Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).					
6	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	0	0	2	2	27,8

Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

4. Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya Zero Growth. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 0,219 bisa tercapai.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Penduduk					
2	LPP	0.34	0.32	0.289	0.260	0.241
3	Penurunan LPP	0.22	0.02	0.031	0.029	0.019

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2020

5. Kesertaan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2019 berdasarkan proyeksi BPS sebanyak 1.440.671 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 715.904 jiwa (49,70%) dan perempuan sebanyak 724.767 jiwa (50,30%). Jumlah tersebut semakin meningkat sebesar 0,26% dibanding tahun 2018 sebanyak 1.437.225 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 714.305 jiwa (49,70%) dan perempuan sebanyak 722.920 (50,30%). Apabila dilihat dari persentasenya, persentase penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasar jenis kelamin tahun 2015 - 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.11
Penduduk Kabupaten Tegal Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Margasari	47.428	48.199	95.627
2	Bumijawa	42.094	42.269	84.363
3	Bojong	30.148	31.838	61.986
4	Balapulang	40.501	41.393	81.894
5	Pagerbarang	26.114	26.489	52.603
6	Lebaksiu	40.940	42.965	83.905
7	Jatinegara	26.773	27.329	54.102
8	Kedungbanteng	20.308	20.107	40.415
9	Pangkah	50.914	50.970	101.884
10	Slawi	35.977	37.535	73.532
11	Dukuhwaru	29.700	30.657	60.357

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
12	Adiwerna	60.134	59.545	119.679
13	Dukuhturi	44.765	44.209	88.974
14	Talang	52.430	52.281	104.711
15	Tarub	39.798	39.494	79.292
16	Kramat	57.073	58.461	115.534
17	Suradadi	40.651	40.925	81.576
18	Warureja	30.156	30.101	60.257
	2019	715.904	724.767	1.440.671
	2018	714.305	722.920	1.437.225
	2017	712.511	721.004	1.433.515
	2016	710.513	718.873	1.429.386
	2015	708.301	716.590	1.424.891

Sumber : Proyeksi BPS Kabupaten Tegal

Sedangkan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tegal dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berfluktuasi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	TFR	2.30	2.28	2.42	2.47	2.24

Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Tahun 2015 TFR diketahui 2,30 mengalami penurunan sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2016. TFR mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018 dan menurun kembali di tahun 2019. Hal ini perlu mendapat perhatian seluruh pihak sehingga ke depannya diharapkan dapat terkendali dan kembali menurun.

Penurunan Total Fertility Rate (TFR) dilakukan dengan menggalakkan program KB yang diarahkan pada capaian peningkatan jumlah peserta KB aktif. dilakukan dengan cara menggalakkan program KB yang diarahkan pada capaian peningkatan jumlah peserta KB aktif.

Kepesertaan KB aktif mulai tahun 2015 mengalami penurunan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Kab. Tegal Thn 2015-2019

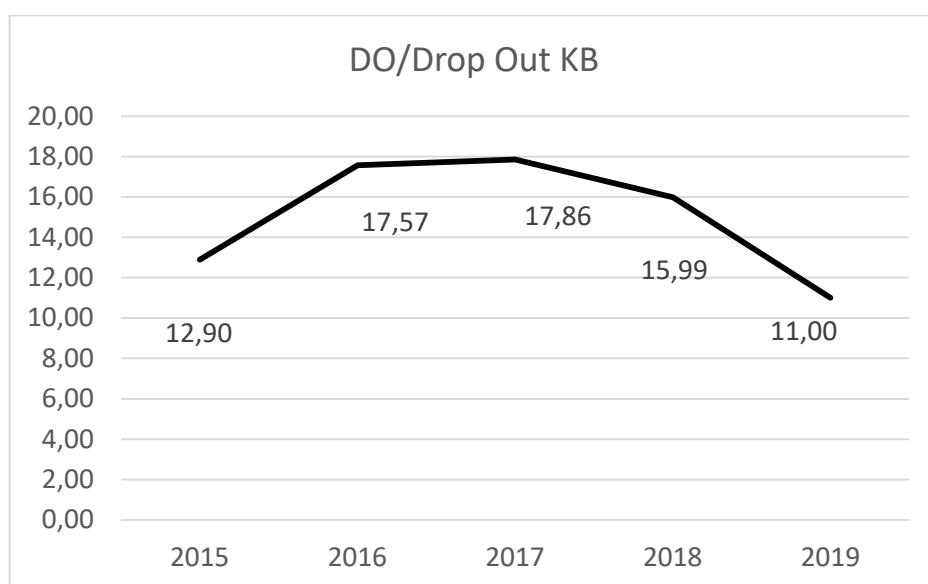
No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Peserta KB	214.769	210.584	206.398	203.349	205.527

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	(Jumlah Akseptor KB)					
2.	Jumlah PUS	300.902	293.088	294.221	297.296	302.589
3.	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	71.38	71.85	70.15	68.40	67.92

Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Kepesertaan KB Aktif mulai tahun 2015 - 2019 terus mengalami penurunan. Demikian pula untuk angka drop out peserta KB sebagaimana tabel berikut :

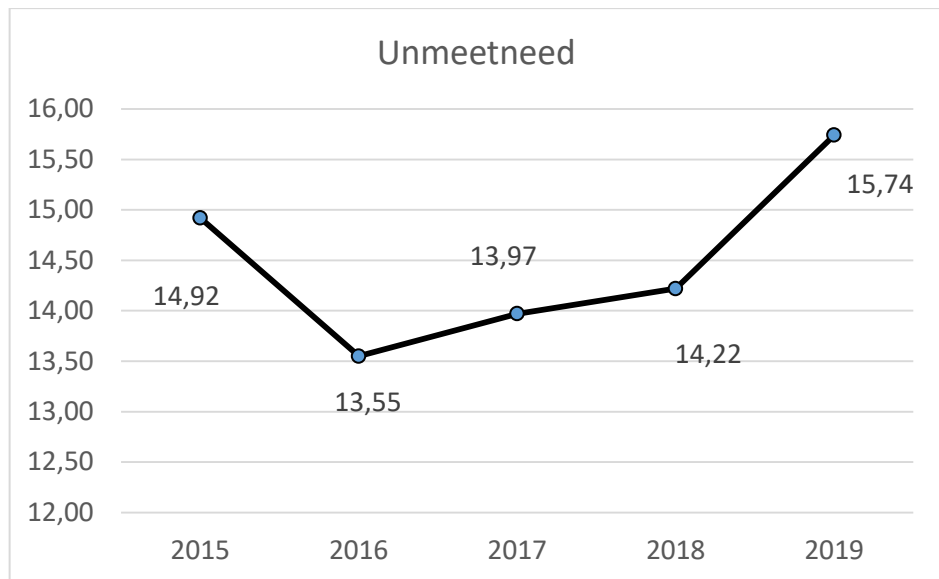
Gambar 2.6
Grafik Drop Out KB Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019



Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Sebaliknya, pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi tidak ber-KB (unmeet need) mulai tahun 2015 mengalami fluktuasi dan terdapat kecenderungan bertambah sebagaimana grafik berikut ini :

Gambar 2.7
Grafik Unmeet need KB Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019



Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Peningkatan unmeet need KB akan menyebabkan berkurangnya jumlah kepesertaan KB dan dapat memicu peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Penurunan kepesertaan KB aktif dan bertambahnya unmeetneed KB disebabkan karena masih banyaknya penggunaan KB non MKJP yaitu sebesar 70,35%, terbatasnya jumlah PLKB (rata-rata 1 PKLB menangani 3 desa) dan takut terhadap efek samping.

6. Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Ketahanan keluarga mencakup pengembangan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia). Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa

lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan program ketahanan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Capaian Kegiatan Ketahanan Keluarga di Kab Tegal Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	81,91% 62,3	83,03% 83,03	83,03% 83,03	71.36% 60.66	75.46% 64,30
2.	Cakupan Anggota BKR ber KB	46,88	81,64	42,57	28,11	67,71
3.	Cakupan Anggota BKL ber KB	63,48	77,37	34,6	37.85	44,56
4.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mhsw	46,6 % (48 dri 103 sek)	48,03% (49 dri 102 sek)	47,17 % (50 dri 106 sek)	48,11 % (51 dari 106 sek)	48,11 % (51 dari 106 sek)
5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	81,66%	80,79%	80,02%	58.21%	42,61%
6.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1	1	1	1	1
7.	Cakupan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)	1.176 (81,1 %)	1.214 (83,72 %)	1.351 (93,17 %)	1.486 (98,18%)	1.486 (98,18%)
8.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kel.	100	100	100	100	100

Sumber : DP3A dan P2KB Kabupaten Tegal, data diolah

Capaian Kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019 pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja	Tar get SPM	Tar get IKK	Target Indika tor lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pencapaian Kota Layak Anak	-	√	-	KLA Prata ma	KLA Nindya	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	Kab Tegal KLA	0	0	0	KLA Prata ma	KLA Prata ma	0.00	0.00	0,00	100.00	100.00
2	Jumlah kebijakan perlindungan anak	-	√	-	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	50.00	50,00	100,00	100.00	100.00
3	Jumlah pengaduan KDRT ke PPT	-	-	√	50	60	70	80	90	78	87	55	48	60	156.00	145,00	78.57	60,00	133.33
4	Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindak lanjuti	-	-	√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Jumlah SKPD melaksana kan PPRG	-	-	√	10	54	54	54	54	30	30	54	54	54	300.00	55.56	100.00	100.00	100.00
6	Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yang me mahami kebijakan yg responsif gender	-	-	√	40	40	40	40	47	40	60	45	45	50	100.00	150.00	112.4	112.4	106.38
7	Jumlah SKPD yang men dapat pelatihan Data pilah	-	-	√	50	50	50	50	50	50	18	48	48	40	100.00	36.00	96.00	96.00	80.00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	-	√	50	50	50	50	50	50	60	50	50	100	100.00	120.00	100.00	100.00	100.00
9	Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender	-	-	√	50	50	50	50	50	50	30	58	58	36	100.00	60.00	116.00	116.0	72.00
10	Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel)	-	-	√	100	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100.00	100.00	100.00
11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	dan anak																		
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih	√	-	-	55	60	65	70	75	55	55	65	100	75	100.00	91.67	153.85	153.85	100.00
14	Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	-	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	55	55	65	65	75	100.00	91.67	153.85	153.85	100.00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002	-	-	√	25	25	25	25	25	25	140	150	25	50	100.00	560.00	600.00	100.00	200.00
16	Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan	-	-	√	50	50	50	50	50	75	70	70	50	70	150.00	140.00	140.00	100.00	140.00
17	Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak"	-	-	√	50	50	50	60	67	7.025	7.03	67	0	67	14,05	14.06	134	0.00	100.00
18	Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak	-	-	√	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	25 PAUD	66 PAUD	70 PAUD	82 PAUD	25 PAUD	83 PAUD	264,00	280.00	328.00	100.00	328.00
19	Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan	-	-	√	3 kec	3 kec	4 kec	4 kec	4 kec	4 kec	8 kec	4 Kec	18 Kec	18 Kec	133,33	266.67	100.00	450.00	450.00
20	Jumlah Forum anak yang aktif	-	-	√	4 Forum	4 Forum	4 Forum	5 Forum	5 Forum	3 Forum	5 Forum	7 Forum	11 Forum	5 Forum	75,00	125.00	175.00	220.00	125.00
21	Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA	-	-	√	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	100 % (31 indikator)	0	0	50 %	72%	80%	0,00	0.00	50.00	72.00	80.00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
22	IPG	-	√	-	61,72	62,72	63,72	64,72	65,72	61,53*	86.76	86.76	87.52	86.74	99,69	138.33	136.16	135.23	131.98
23	IDG	-	√	-	55,16	60,16	65,16	70,16	70,16	51,91*	51.16	51.16	68.90	69.25	94,11	85.04	78.51	98.20	98.70
24	Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi	-	√	-	45,54	48,54	51,54	54,54	57,54	45.54	42.54	42.54	42.54	49.81	100,00	87.64	82.54	78.00	86.56
25	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	-	√	-	10	10	10	10	15	16	20.00	20.00	20.00	24.00	160,00	200.00	200.00	200.00	160.00
26	Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	-	√	-	29,17	32,17	35,17	38,17	41,17	29.17	26.17	26.17	26.17	29.04	100,00	81.35	74.41	68.56	70.54
27	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00
28	Cakupan	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS																		
29	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Cakupan	√	-	-	75	75	75	75	100	75	75	75	100	100	100,00	133.33	133.33	133.33	133.33

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu																		
31	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	√	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	100	100	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
32	Cakupan ketersediaan petugas pendamping	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak																		
33	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	-	60	65	70	75	80	80	80	80	100	100	133,33	123.08	114.29	142.85	125.00
34	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	√	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00
35	Peserta KB aktif	-	-	√	236.774	248.613	261.043	274.095	287.800	213.473	210.584	206,398	203,349	205.527	90,16	84.70	79.07	74.19	71.41
36	Persentase DO	-	√	-	16,29	14,75	13,21	11,67	10,13	12.9	17.57	17,86	15.99	11.00	79,19	97.08	64.80	62.98	91.41
37	Persentase	-	√	-	14,17	14,07	13,97	13,87	13,77	14.92	13.37	13,97	14.22	15.47	105,29	95.02	100.00	97.47	87.65

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Unmeet Need																		
38	Jumlah sosialisasi KRR	-	-	√	300	250	300	300	300	200	300	200	200	300	66,67	120,00	66.67	66.67	100
39	jumlah tempat pelayanan kontrasepsi	-	-	√	57	59	61	63	65	55	57	62	64	66	96,49	93,22	101.64	101.58	101.54
40	Rasio Akseptor KB	-	-	√	79.88	83.88	88.07	92.48	97.10	70.97	71.85	70.80	69.58	67.91	88,85	85.66	80.39	75.24	69.94
41	Cakupan anggota UPPKS ber-KB	-	-	√	83.50	84.3	85.70	86.30	87.00	81.77	80.75	83.03	58.21	79.26	97,92	95.79	96.88	67.45	91.10
42	Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun	-		√	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	95,00	100.00	100.00	100.00	100.00
43	Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif	-	-	√	60	65	70	75	80	60	75	78	78	70	100,00	115,38	111.42	100.00	87.50
44	Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif	-	-	√	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00
45	Jumlah Pusat Konseling KRR	-	-	√	1	1	1	1	1	1	48	1	1	1	100,00	4800	100.00	100.00	100.00
46	Jumlah sosialisasi	-	-	√	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	300,00	100,00	100,00	100,00	100.00

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya (RPJMD)	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tumbuh kembang anak																		
47	Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak	-	-	√	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48	Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi	-	-	√	36	54	62	80	92	36	70	60	60	112	100,00	129,63	96,77	96,77	121,74

2.3.2. Penyelenggaraan Pelayanan Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019

Capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2019 pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat digambarkan pada tabel 2.30 sebagai berikut :

Tabel 2.30 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3A dan P2KB Kabupaten Tegal 2015 - 2019

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	57.500	75.000	74.000	60.000	72.800	35.383	57.958	47.200	49.152	64.533	61.54	77.28	63.78	81.92	97.11	1.500	3.442
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	15.258	15.246	20.040	25.620	28.000	15.200	15.240	19.986	25.620	28.420	99.92	99,96	99.73	100.00	98.00	2.548	2.605
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000	75.000	57.000	50.000	47.000	74.684	74.721	55.470	46.180	45.493	99.58	99,63	97.32	92.36	96.79	- 5.600	-7.135
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	19.500	100	100	100	100	97.50	- 1.000	-1.250
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	40.000	30.000	12.000	12.000	11.000	40.000	30.000	12.000	12.000	11.000	100	100	100	100	100.00	-5.80	-7.000

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Bangunan Kantor																		
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000	15.000	25.000	20.000	9.000	14.600	15.000	24.994	19.853	8.879	97.33	100	99.98	99.27	98.66	-1.200	1.313	
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Paraturan Perundang-an	5.274	4.760	4.760	4.760	5.000	5.145	4.440	4.063	4.450	4.833	97.55	93,28	85.36	81.92	96.66	-54.8	-173	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	75.000	75.000	50.000	45.000	52.000	74.462	73.897	49.800	44.455	52.000	99,28	98,53	99.60	98.79	100.00	-4.60	-7.501	
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	94.000	115.000	120.000	115.000	120.000	92.576	115.000	119.825	114.632	118.475	98,49	100,00	99.85	99.68	98.95	5.200	5.514	
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																		
10	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)/Pembangunan Balai	411.025	233.600	-	-	381.183	407.720	226.348	-	-	-	99,20	96,90	-	-	-	-5.968	-101.930	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyuluh																	
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	400.000	200.000	250.000	-	-	378.042	191.835	239.355	-	-	94,51	95,92	95,74	-	-	-	-
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	61.239	46.989	67.000	40.000	35.555	60.847	43.305	64.153	39.119	33.472	99,36	92,16	95,75	97,80	94,14	-	-5,432
13	Pengadaan mebeleur	50.000	50.000	75.000	45.000	45.595	49.442	49.391	73.270	44.284	40.465	98,88	98,78	97,69	98,41	88,75	-881	-1,276
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)/Pengadaan Sarana Pendataan	200.000	-	-	-	172.475	199.459	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	-	-
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	30.000	60.000	111.240	30.000	215.000	29.415	59.997	104.746	18.913	212.627	98,05	100,00	94,16	63,05	98,90	-	-2,625
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	175.000	200.000	280.130	200.000	200.000	174.128	191.835	205.715	199.263	175.866	99,50	95,92	73,44	99,63	87,93	5.000	1,857
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung	50.000	75.000	75.000	45.000	-	49.798	74.323	72.297	0	-	99,60	99,10	96,40	0,00	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Kantor																		
18	Penyempurnaan UPT PPKB/ Alih Fungsi	50.000	-	-	200.000	-	49.620	-	-	196.339	-	99,24	-	-	98.17	-	-	10.000	36.679
19	Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Dinas	-	75.000	175.000	-	-	-	74.610	172.750	-	-	-	99,48	98.71	-	-	0	0	
20	Pengadaan Mobil Box (DAK)/ Pengadaan Sarana kerja PLKB (DAK)	-	203.800	-	302.520	168.000	-	200.225	-	259.520	-	-	98,25	-	85.79	-	33.600	64.880	
21	Pengadaan BKB Kit (DAK)/ Pengadaan PPKBD Kit	198.000	146.575	-	339.480	523.775	194.404	142.054	-	276.072	398.380	98,18	96,92	-	81.32	76.06	65.155	20.417	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
22	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	55.000	49.500	30.000	30.000	35.000	54.599	49.197	29.193	9.750	27.200	99,27	99,39	97.31	32.50	77.71	4.000	-	11.212

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
23	Penilaian Angka Kredit Bagi PNS Fungsional	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-	19.598	19.999	19.305	100	-	97.99	100.00	96,53	0	-0.25
24	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis lainnya		20.000	-	-	-	-	19.850	-	-	-	-	99,25	-	-	-	0	0
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																	
25	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.192	10.000	9.952	100,00	100,00	93.79	100.00	99.52	0	0
26	Penatausahaan admi	32.500	32.500	70.000	67.500	68.500	31.199	32.428	69.995	66.285	68.500	96,00	99,78	99.94	98.20	100.00	7.200	8.771

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	nistrasi pengelolaan keuangan SKPD																		
V	Program Keluarga Berencana																		
27	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi Bagi keluarga Miskin	320.000	400.000	400.000	395.000	628.250	307.513	351.482	297.213	358.475	467.387	96,10	87,87	74.30	90.75	74.40	16.000	12.740	
28	Pelayanan KIE	45.090	45.090	95.000	85.000	89.800	44.355	42.100	80.482	44.394	59.355	98,37	93,37	84.72	52.23	66.10	8.942	9.75	
29	Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Gudang Alat Kontrasepsi	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	18.462	19.993	14.679	13.529	14.097	92,31	99,97	97.86	90.20	93.98	-1.000	-1.233	
30	KIE Bagi Masyarakat Melalui Media Elektronik	48.000	50.000	-	-	-	47.466	31.186	-	-	-	98,89	62,37	-	-	-	-9.600	-11.849	
31	Pembuatan Data Keluarga	178.825	160.943	243.500	221.300	236.800	161.554	157.596	232.695	168.797	176.059	90,34	97,92	95.56	76.28	74.35	11.595	1.810	
32	Pengembangan Data	33.799	33.500	-	-	-	32.724	33.120	-	-	-	96,82	98,87	-	-	-	-6.759	-8.181	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	dan Analisa Program KB																		
33	Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	50.000	50.000	-	-	-	50.000	49.990	-	-	-	100,00	99,98	-	-	-	-	10,000	12,500
34	Integrasi KB Kesehatan	-	50.000	100.000	85.000	100.000	-	49.020	96.945	80.325	90.588	-	98,04	96,95	94,50	90,59	20,000	20,081	
35	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Program KKB bagi Fapsedu dan Koalisi Kependudukan	-	50.000	50.000	15.000	55.000	-	33.315	49.585	14.996	50.695	-	66,63	99,17	99,97	92,17	11,000	3,749	
36	Operasional Keluarga Berencana	-	644.850	796.380	5.139.990	5.433.800	-	498.646	419.355	2.579.278	4.746.478	-	77,33	52,66	50,18	87,35	1.086.760	644,819	
VI	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan																		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	an																	
37	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	15.650	47.000	80.000	56.000	45.000	15.626	38.064	76.770	55.850	44.799	99,85	80,99	95.96	99.73	99.55	5.870	10.056
38	Penyelenggaraan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga	24.394	-	40.000	40.000	45.000	20.894	-	39.900	39.950	44.979	85,65	-	99.75	99.98	99.95	4.121	4.764
39	Penyelenggaraan Forum Anak	-	26.000	-	-	-	-	24.826	-	-	-	-	95,48	-	-	-	0	0
40	Pelatihan KHA Bagi petugas kesehatan dan pendirian/ Pelatihan Standar	-	15.000	25.000	20.000	-	-	13.885	25.000	19.720	-	-	92,57	100.00	98.60	-	0	78.880

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	TPA																		
VII	Program Kesehatan Reproduksi Remaja																		
41	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	30.000	27.594,88	20.000	20.000	50.000	30.000	20.869	20.000	17.400	49.039	100,00	75,63	100,00	87,00	98,08	4.000	-3.150	
VIII	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan																		
42	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	15.904	15.000	20.000	20.000	25.000	15.873	14.549	19,811	17.470	24.879	99,81	96,99	99,06	87,00	99,52	1.819	399.25	
43	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan menengah	15.000	15.000	-	-	-	14.100	12.406	-	-	-	94,00	82,71	-	-	-	-	3.000	-3.525

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	di Perdesaan																		
IX	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																		
44	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan		21.099	-	-	-	-	19.129	-	-	-	-	90,66	-	-	-	0	0	
45	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP)	20.000	20.000	-	-	-	19.352	19.840	-	-	-	96,76	99,20	-	-	-	-	5.000	0
46	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	20.846	20.846	20.000	-	-	20.486	19.927	19.372	-	-	98,27	95,59	96,86	-	-	-	4.169	-5121
47	Peningkatan kapasi	25.000	30.000	25.000	25.000	40.000	22.146	25.354	22.680	24.365	37.471	88,58	84,51	90,72	97,46	93,68	3.000	554	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	tas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak																		
48	Advokasi dan fasilitasi anak yang berhadapan dengan hukum	21.099	-	-	-	-	20.383	-	-	--	-	96,61	-	-	-	-	-	4.219	-5.095
49	Kebijakan dan program yang responsive gender	20.280	20.280	25.000	25.000	25.000	19.783	19.875	23.885	24.840	22.269	97,55	98,00	95,54	99,36	89,08	944	1.241	
50	Anggaran responsive gender	62.220	55.998	65.000	65.000	75.000	56.837	53.388	64.600	64.366	68.750	91,35	95,34	99,38	99,03	91,67	2.556	1.882	
51	Pembentukan Forum Anak	30.000	-	30.000	59.000	160.000	26.396	-	29.710	58.812	159.783	87,99	-	99,03	99,68	99,86	26.000	8.104	
52	Evaluasi Pelaksanaan PUG	-	25.000	-	-	-	-	24.350	-	-	-	-	97,40	-	-	-	0	0	
53	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan	-	6.000	30.000	30.000	30.000	-	6.000	29.950	29.910	29.750	-	100,00	99,83	99,70	99,17	6.000	7.477	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	Anak/ Pembuatan Data pilah Anak																		
X	Program Pelayanan Kontrasepsi																		
54	Pengadaan Alat Kontrasepsi	300.000	200.000	200.000	200.000	0	195.975	172.162	191.435	196.798	0	65,33	86,08	95.72	98.38	-	-	205	
55	Pengadaan Sarana Pelayanan KB	100.000	-	-	-	50.000	72.036	-	-	-	45.868	72,04	-	-	-	91.74	-	-	
56	Pengadaan Sarana Obsgyn Bed (DAK)	190.000	-	-	-	-	187.827	-	-	-	-	98,86	-	-	-	-	-	-	
57	Pengadaan Sarana KIE KIT (DAK)	165.000	-	-	-	-	163.560	-	-	-	-	99,13	-	-	-	-	-	-	
58	Pengadaan Sarana IUD Kit (DAK)	104.214	115.315	120.300	-	-	99.706	113.976	124.143	-	-	95,68	98,84	95.35	-	-	-	-	
59	Pengadaan Sarana GenRe Kit (DAK)	80.500	99.940	194.400	-	-	79.760	99.490	191.804	-	-	99,08	99,55	99.02	-	-	-	-	
60	Pengadaan sarana	120.000	164.000	-	-	-	119.130	160.536	-	-	-	99,28	97,89	-	-	-	-	-	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	implant Removal Kit (DAK)																0	2
61	Pelayanan KB Medis Operasi	-	100.000	-	-	-	-	97.714	-	-	-	-	97,71	-	-	-	0	0
XI	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																	
62	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	41.945	41.945	-	-	-	41.361	38.148	-	-	-	98,61	90,95	-	-	-	8.389	10.340
63	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	47.010	47.010	95.000	95.000	150.000	37.002	46.018	88.857	88.793	145.609	78,71	97,89	93.53	93.47	97.07	20.598	12.947
64	Penguatan Kapasitas	19.920	19.920	20.000	20.000	45.000	19.488	19.128	19.732	18.385	43.320	97,83	96,02	96.86	91.93	96.27	-5.016	-275

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga miskin																		
65	Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	19.231	19.775	17.465	18.600	24.774	96,16	98,88	87,33	93,00	99,10	1.000	-157	
66	Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan	19.920	19.920	20.000	20.000	40.000	18.193	19.900	19.117	19.940	39.884	91,33	99,90	95,59	99,70	99,71	4.016	436	
XII	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan																		
67	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga	52.748	47.474	47.500	45.000	45.000	32.650	44.294	44.046	44.665	43.886	61,90	93,30	92,73	99,26	97,53	-1.549	3.003	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	sejahtera																	
68	Pembinaan organisasi perempuan	140.000	126.000	200.000	200.000	210.000	138.000	126.000	198.030	191.859	207.722	98,57	100,00	99.02	95.93	98.92	14.000	13.464
XIII	Program pengembangan bahan informasi tentang pengusaha dan pembinaan tumbuh kembang anak																	
69	Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengusaha dan pembinaan Tumbuh kembang anak	11.797	11.797	12.000	12.000	37.000	9.437	10.097	11.950	11.820	36.788	79,99	85,59	99.58	98.50	99.43	5.040	595
XIV	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga																	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
70	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	101.123	90.000	70.000	70.000	56.200	98.180	89.755	61.220	62.213	56.084	97,09	99,73	87.46	88.88	99.79	- 8.984	-8.991
71	Pembinaan Kader Pembantu Pembina KB Desa	100.595	200.595	708.800	402.489	-	98.818	197.240	708.327	383.614	-	98,23	98,33	99.93	95.31	-	56.603	71.199
72	Pembinaan pencatatan dan pelaporan analisa kinerja KB	57.145,68	50.000	-	-	-	55.620	4-5.179	-	-	-	97,33	90,36	-	-	-	11.429	13.905
XV	Program Perencanaan Sosial dan Budaya																	
73	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	51.588	-	-	-	-	50.405	-	-	-	-	97,71	-	-	-	-	10.317	12.601
74	Akselerasi pencapaian Kabupaten Tegal Layak Anak	-	63.000	100.000	100.000	190.000	-	62.577	99.721	99.656	189.969	-	99,33	99.72	99.66	99.98	38.000	24.914

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
75	Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak	-	50.000	-	-	-	-	46.913	-	-	-	-	93,83	-	-	-	0	0
XVI	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU																	
76	Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	52.564	-	50.000	50.000	50.000	37.888	-	48.337	49.999	49.679	72,08	-	96.68	100.00	99.36	-512	3.027
XVI I	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR																	
77	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi	-	25.000	15.000	15.000	32.000	-	22.299	14.024	14.901	31.996	-	89,20	93.49	99.34	99.99	6.400	3.725

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	dan Konseling KRR																		
78	Pengembangan Kelompok BKR Percontohan	-	25.000	25.000	25.000	33.000	-	23.199	23.209	24.999	32.685	-	92,80	92.84	100.00	99.05	6.600	6.249	
XVI II	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS																		
79	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	-	30.000	-	-	-	-	26.880	-	-	-	-	89,60	-	-	-	0	0	
XIX	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa																		
80	Pengembangan	150.000	-	90.000	40.000	20.000	134.792	-	77.753	39.355	19.900	89,86	-	86.39	98.39	99.50	-	-	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	gan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)																	26.000	23.859
XX	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																		
81	Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	18.000	18.480	34.500	63.900	-	17.976	18.480	34.500	-	-	99,87	100.00	100.00	-	0	8.625	
XXI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		
82	Penyelenggaraan Forum SKPD	-	-	5.000	5.000	10.000	-	-	4.999	5.000	9.084	-	-	100.00	100.00	90.84	2.000	1.250	
83	Review Renstra SKPD/Penyusunan Renstra	-	-	10.000	-	20.000	-	-	9.703	-	19.848	-	-	97.04	-	99.24	4.000	-	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
84	Maturitas SPIP	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-		-	-	-	-		2.000	-
XXII	Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi																	
85	Penyelenggaraan Pameran Investasi/ Fasilitas Kemitraan swasta dan UMKM di Pedesaan	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	14.100	12.406	14.100	12.500	19.699	94.00	82.71	94.00	83.33	98.50	1.000	-400

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4.1. Tantangan serta Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tantangan

- a. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam PUG (pengarusutamaan Gender) dan PP (Pemberdayaan Perempuan);
- b. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- c. Kelompok kerja PUG belum optimal;
- d. Kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- e. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- f. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- g. Adanya disharmoni antar undang-undang terkait anak, misalnya batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak adalah 18 tahun;
- h. Pengungkapan kasus-kasus KDRT terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;

2. Peluang

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;

- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- e. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat kabupaten serta pengembangan di tingkat kecamatan dan desa;
- f. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- h. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, PP dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

2.4.2. Tantangan serta Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

- a. Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
- b. Bertambahnya PUS (Pasangan Usia Subur) Unmeetneed;
- c. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
- d. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
- e. Kurangnya kapasitas PPKBD (Pembantu Penyuluh KB Desa) dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- f. Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga

2. Peluang

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- b. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung program KKBPK;

- c. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.

Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di desa/kelurahan.

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P3AP2 DAN KB Kabupaten Tegal

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya upaya dalam mempertahankan capaian kinerja pemberdayaan perempuan	Belum maksimalnya upaya pelaksanaan pemberdayaan perempuan secara terpadu lintas sektor	Belum maksimalnya PPRG (perencanaan penganggaran responsif gender) pada semua Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kesetaraan Gender Rendahnya keterampilan teknis PPRG aparat perencanaan Perangkat Daerah Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui PPRG Belum tersinkronisanya data pilah Gender dari lintas sektor serta belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>pemanfaatan data pilah gender</p> <p>Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan</p> <p>Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana/prasarana pelayanan terpadu</p> <p>Belum optimalnya kinerja lembaga penyedia pelayanan perlindungan perempuan</p>
2	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan Hak Anak	Kuranganya keterpaduan lintas sektor/ OPD/ Lembaga terkait dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak	<p>Belum optimalnya peran kelembagaan pemenuhan hak anak</p> <p>Belum tersinkronisanya data pilah anak dari lintas sektor serta belum optimalnya pemanfaatan data pilah anak</p> <p>Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pemenuhan hak dan perlindungan anak</p> <p>Belum optimalnya upaya pencegahan dan sistem perlindungan anak (termasuk sistem hukum, kebijakan serta pelaksanaannya)</p> <p>Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan memenuhi hak - hak anak</p>
3	Masih tingginya Laju	Belum optimalnya	Belum adanya kebijakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pertumbuhan Penduduk (LPP)	program pengendalian penduduk	pengendalian penduduk
			Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan KB sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan KB
			Terbatasnya kompetensi SDM dalam pengembangan kapasitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
		Masih rendahnya capaian anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL) menjadi akseptor KB sehingga ketahanan keluarga belum tercapai	Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan pengendalian penduduk
			Masih rendahnya partisipasi keluarga pada kelompok kegiatan dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung program pembangunan keluarga
	Masih rendahnya CPR (<i>contraceptive prevalence rate</i>)		Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB)
			Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Rendahnya jumlah peserta KB aktif dan tingginya Unmeetneed
			Masih tingginya pernikahan dibawah 20 tahun
			Belum optimalnya advokasi penggerakan program KB dan media KIE guna peningkatan ke-sertaan KB penurunan unmeet-need
			Belum optimalnya advokasi dan KIE mengenai pendewasaan usia perkawinan
			Kurangnya advokasi penggerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana
			Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB)
4	Belum optimalnya kualitas manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal	Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis SDM
		Kurangnya jumlah dan kompetensi teknis pegawai	
		Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan alokasi anggaran

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka

menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka penjabaran misi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas P3AP2 dan KB sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program, Dinas P3AP2 dan KB tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas P3AP2 dan KB, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Visi : Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia</p> <p>Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p>Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan</p>	Belum optimalnya upaya dalam mempertahankan capaian kinerja pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi PUG (pengarusutamaan Gender) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) belum menjadi mainstream bagi seluruh Perangkat Daerah • Rendahnya kesempatan kerja/berwirausaha bagi perempuan • Belum optimalnya kinerja lembaga penyedia layanan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan • Pengumpulan data lintas sektor belum terkoordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan PUG dan PP dan perlindungan perempuan • Meningkatnya kesadaran perempuan untuk berwirausaha baik perorangan maupun kelompok dengan tetap menjaga dan mendampingi anak di rumah
		Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya program kegiatan yang responsif hak anak di 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	<p>anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian pendu</p>	<p>Hak Anak</p>	<p>perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan utamanya pelibatan anak dalam proses pengambilan keputusan • Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak 	<p>pemenuhan hak dan perlindungan anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah diundangkan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
		<p>Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk • Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan KB sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusunnya dokumen analisa data kinerja bulanan dan analisa data multi indikator • Telah terbentuknya kepengurusan Koalisi Kependudukan dan FAPSEDU

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	<p>duk dan keluarga berencana;</p> <p>f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kompetensi SDM dalam pengembangan kapasitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk • Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan pengendalian penduduk 	(Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)
		Masih rendahnya CPR (<i>contraceptive prevalence rate</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alkon MKJP • Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan KB • Belum maksimalnya <i>mapping</i> PUS yang kategori Unmeet Need di masing-masing desa / kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam mendukung program KB
		Terbatasnya ketersediaan Penyuluh KB	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan tenaga penyuluh KB ditentukan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya media KIE dan Advokasi bagi pengembang

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			pemerintah pusat	<p>an KKBPK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat
		Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi metode jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang alat kontrasepsi MKJP • Belum optimalnya advokasi penggerakan program KB dan media KIE guna peningkatan kesertaan KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam mendukung program KB • Dukungan Organisasi Profesi (IBI, TP-PKK) serta organisasi keagamaan dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama • Adanya media KIE dan Advokasi bagi pengembangan KKBPK
		Masih rendahnya capaian anggota kelompok	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
		kegiatan (BKB, BKR, BKL) menjadi akseptor KB sehingga ketahanan keluarga belum tercapai	masyarakat dan remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual serta perkawinan usia dini • Semakin berkurangnya jumlah tenaga penyuluh lapangan KB • Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung program pembangunan keluarga	mendukung program KB • Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, Faktor pendorong pencapaian misi yaitu:

1. Dukungan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan komitmen bersama seluruh aparatur.
2. Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya
3. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong terciptanya *good governance* dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

4. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi percepatan pencapaian misi antara lain:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum memadai.
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang.
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan program pada masing-masing bidang
4. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien.
5. Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
7. Masih rendahnya kesadaran ASN untuk memberikan pelayanan publik yang prima

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dengan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 - 2024

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong“. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan perempuan dan perlindungan anak
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020- 2024

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
1	Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan, dengan sasaran	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal (100)	• Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif Gender belum optimal	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Fungsi : a. Perumusan kebijakan di	Komposit IDG bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat tiap		

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	bidang pem berdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	tahun Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan PPRG	
2	Tujuan : Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO dengan sasaran :	b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pem berdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;			
	Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir	c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga be-	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan serta jumlah kasus KDRT	Terbatasnya personel yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait melalui PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)
	a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang	Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana/prasarana yang mendukung		
3	Tujuan : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak		• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam	Terbatasnya personel yang melayani penanganan kasus kekerasan	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	dengan sasaran : Meningkatnya pemenuhan indikator KLA	<p>pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p>	<p>hak-hak anak seperti : pekerja anak, perkawinan anak dan ABH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	terhadap perempuan dan anak	melalui PPT
4	<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran :</p> <p>a. Indeks Partisipasi Masyarakat</p> <p>b. Indeks Kualitas Keluarga</p>	<p>f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,</p>	<p>Kurangnya partisipasi masyarakat dalam PPPA</p>	<p>Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam PPPA masih kurang</p>	<p>Ada beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang PPPA</p>

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
		pengendalian penduduk dan keluarga berencana.			

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Dalam RPJMN tahun 2020-2024 untuk mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tujuan :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tercantum pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	Tujuan : 1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram,	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati menyelenggara			

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	mandiri dan bahagia 2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan dengan sasaran :	kan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan			
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)				
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)		Menurunnya angka <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan MKJP karena takut efek samping 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam mendukung program KB • Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmet Need		Bertambahnya persentase Unmet Need	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin berkurang jumlah tenaga lapangan KB 	
4	Menurunnya		Rendahnya		

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	kesertaan KB yang menggunakan MKJP	(1:3) • Belum optimalnya organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan KB dalam mendukung program KB	membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	Tingginya drop out KB	• Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) • Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga	
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan			

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
		oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.			

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 untuk mendukung Visi Gubernur “Terwujudnya Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi “. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan dan Sasaran Renstra DPPA Dalduk dan KB	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
1	Tujuan : Meningkatkan	Tugas Perangkat Daerah :			

No	Tujuan dan Sasaran Renstra DPPA Dalduk dan KB	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran :	Membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
	a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif Gender belum optimal • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG, PUHA dan PPRG, ARA 	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jumlah kasus KDRT	Terbatasnya personel yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan instansi terkait melalui PPT
2	Tujuan : Mewujudkan keluarga kecil berkualitas, dengan sasaran :				

No	Tujuan dan Sasaran Renstra DPPA Dalduk dan KB	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	a. Meningkatnya kesertaan KB	<p>perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) • Bertambahnya persentase Unmeet Need • Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan MKJP • Tingginya drop out KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan MKJP karena takut efek samping • Semakin berkurang jumlah tenaga lapangan KB (1:3) • Belum optimalnya organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan KB dalam mendukung program KB 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam mendukung program KB • Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat
	b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<p>f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</p> <p>g. Pelaksanaan</p>	Menurunnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) • Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dan dukungan kepala daerah dalam mendukung pemberdayaan keluarga

No	Tujuan dan Sasaran Renstra DPPA Dalduk dan KB	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
		fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.			

3.3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari segi tata ruang ada keterkaitan dimana perencanaan tata ruang kota yang sensitif terhadap kebutuhan anak akan mendukung pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focused Group Discussion (FGD)* ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya upaya dalam mempertahankan capaian kinerja pemberdayaan perempuan
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan Hak Anak
3. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
Sasaran yang akan dicapai : Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak
Sasaran yang akan dicapai : Meningkatnya pemenuhan hak anak
3. Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Sasaran yang akan dicapai :
 - a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
 - b. Meningkatnya ketahanan keluarga
 - c. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan
Sasaran yang akan dicapai : Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan

Secara rinci tujuan, sasaran serta indikator kinerja dan target sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P3AP2 dan KB Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Persentase pencapaian keadilan dan kesetaraan Gender	70	72	73	75	76	77	77
2	Meningkatkan pemenuhan hak	Meningkatnya pemenuhan hak	Persentase pencapaian pemenuhan Hak Anak	50	55	60	65	70	75	75
3	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Prosentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.28	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22
		Meningkatnya ketahanan keluarga	Prosentase Ketahanan Keluarga	45	48	52	55	58	60	60
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Prosentase Pemakaian kontrasepsi/ CPR	69.14	69.81	70.21	70.61	71.01	71.41	71.41
4	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3A dan P2KB	Prosentase Layanan Kesekretariatan	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas sumber daya yang kompeten dan terlatih dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) • Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemberdayaan • Meningkatkan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah • Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan • Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha • Meningkatkan pelibatan anak dalam proses pembangunan • Meningkatkan penguatan dan pengembangan lembaga masyarakat untuk peningkatan kualitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			hidup anak <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak • Meningkatkan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak
3	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan • Mengintegrasikan pendidikan kependudukan di SMA/SMK
		Meningkatnya ketahanan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan advokasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program pembangunan keluarga
		Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesertaan KB MKJP • Meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB • Meningkatkan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE KB • Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi khususnya bagi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan • Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas melalui pengembangan kampung KB

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
4	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian dan keuangan perangkat daerah • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah • Mengoptimalkan capaian fisik kegiatan dan capaian indikator Renstra

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra, sebagaimana berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatkan kompetensi SDM dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga menuju kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga	Meningkatkan peran dan sinergitas forum, jejaring, kemitraan dalam pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga menuju kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga	Meningkatkan peranan perempuan dan anak serta kesertaan KB menuju kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga	Meningkatkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga yang didukung oleh peran perempuan dan anak dalam pembangunan serta kesertaan KB dan ekonomi keluarga yang makin mantap	Mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk guna mewujudkan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 - 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Anak;
3. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
4. Program Keluarga Berencana;
5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB.

6.2. Kegiatan

- A. Program Pemberdayaan Perempuan
 1. Kegiatan Pengarusutamaan Gender
 2. Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- B. Program Perlindungan Anak;
 1. Kegiatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak
 2. Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- C. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
 1. Kegiatan Data dan Informasi
 2. Kegiatan Parameter, Analisa, Advokasi dan Pengendalian Penduduk
 3. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan Pendataan
 4. Kegiatan Keluarga Sejahtera
 5. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan kelompok kegiatan Tribina
- D. Program Keluarga Berencana;
 1. Kegiatan Jaminan Advokasi, KIE dan Pembinaan Lini Lapangan
 2. Kegiatan Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB
 3. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja

4. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dukungan Pelayanan KB
 5. Kegiatan Bantuan Operasional KB Keluarga Berencana (DAK)
- E. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan DP3AP2 dan KB
1. Kegiatan Umum dan Kepegawaian
 2. Kegiatan Perencanaan
 3. Kegiatan Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai pencapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi kinerja akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen,	70	72	73	75	76	77	77
2	Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen	50	55	60	65	70	75	75
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Prosen	0,28	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0.22
2	Prosentase Ketahanan keluarga	Prosen	45	48	52	55	58	60	60
3	Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Prosen	69,14	69,81	70,21	70,61	71,01	71,41	71.41

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi kinerja akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Prosen, Tahunan	69.05	69.30	69.70	70.16	70.80	71.40	71.40
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Prosen, Tahunan	86.76	86.85	86.94	87.03	87.12	87.21	87.21
3	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	2.47	2.44	2.40	2.37	2.33	2.30	2.30

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2020, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2019, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2020 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2019-2024. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana dan prasarana guna sebesar-besarnya

mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayaan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik
2. Advokasi dan koordinasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di semua perangkat daerah

3. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan KB melalui optimalisasi KIE, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB;

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024